

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
BAHASA INDONESIA
(Untuk keperluan sekolah penggerak)



Nama : I Dewa Gede Anom, S.Pd.
Kelas : XII (Dua belas)
Tahun Ajar : 2021/2022

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(Untuk keperluan sekolah penggerak)

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Semarang
 Kelas / Semester : XII /Ganjil
 Kompetensi Dasar : 3.6 Menganalisis struktur teks editorial
 Pembelajaran ke : 1 (satu)
 Alokasi waktu : 10 menit

A. Tujuan Pembelajaran	Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran <i>problem based learning</i> peserta didik dapat menganalisis struktur teks editorial dengan baik.			
B. Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Awal	Guru memberikan salam kepada siswa, berdoa bersama-sama, mengecek kehadiran siswa serta memberikan motivasi belajar, menyampaikan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta cakupan materi dalam kegiatan pembelajaran.	PPK (Pendidikan Penguatan Karakter)	
	Kegiatan Inti <i>Orientasi pada masalah</i> <i>Mengorganisasi siswa</i> <i>Membimbing penyelidikan</i> <i>Mengembangkan dan menyajikan hasil</i> <i>Menmnganalisis dan mengevaluasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok (1 kelompok terdiri dari 2 orang) • Peserta didik membaca teks editorial berjudul “Memanjakan Koruptor” • Guru memastikan peserta didik memahami tugasnya menganalisis struktur teks editorial teks berjudul “Memanjakan Koruptor” • Guru memantau diskusi peserta didik. • Perwakilan kelompok menyampaikan hasil analisis struktur teks editorial berjudul “Memanjakan Koruptor” dan menjelaskan bagaimana cara kelompoknya menemukan struktur teks editorial dalam teks tersebut. • Peserta didik lain mengomentari presentasi temannya dan kegiatan dilanjutkan dengan membuat simpulan materi. 	PPK (Pendidikan Penguatan Karakter)	
	Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menjawab 2 soal sebagai bentuk evaluasi akhir. • Peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai kemudian peserta didik membuat simpulan hasil pembelajaran. • Peserta didik bersama-sama dengan guru berdoa untuk mengakhiri pembelajaran 		
	C. Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penilaian Sikap ➢ Penilaian Pengetahuan ➢ Penilaian Keterampilan 		

Semarang, 24 November 2021
Kepala SMA N 1 Semarang

I Dewa Gede Anom, S.Pd.
NIP 19661003 198902 1 003

A. PENILAIAN SIKAP

Nama Satuan pendidikan : SMAN 1 Semarang
 Kabupaten : Klungkung
 Kelas/Semester : XII/1

No	Nama siswa	Waktu	Prilaku/Sikap	Positif/Negatif	Tindak lanjut
1.					
2.					
Dst					

B. PENILAIAN PENGETAHUAN

NO	Soal	Kunci Jawaban	SKOR
1	<p>Perhatikan penggalan paragraf berikut!</p> <p>Lonjakan kasus positif covid-19 yang terjadi di Inggris menjadi perhatian Indonesia. Kasus covid-19 kembali meledak di Inggris. Padahal, cakupan vaksinasi di negara itu telah melebihi 70% jumlah penduduk. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya kini terus mengamati perkembangan situasi covid-19 di Inggris. "Kami sudah lihat di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2," katanya dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.</p> <p>Penggalan paragraf di atas merupakan struktur teks editorial bagian?</p>	Pengenalan isu (tesis)	50
2	<p>Perhatikan penggalan paragraf berikut!</p> <p>Selain harus sukses dari sisi penyelenggaraan, event bertaraf internasional ini eloknya juga dapat memberi manfaat ekonomi serta hiburan bagi warga setempat. Harga tiket termurah yang dipatok sekitar Rp800 ribu hingga Rp1 juta, rasanya masih terlalu mahal bagi warga Lombok serta NTB pada umumnya. Pihak penyelenggara mungkin dapat mempertimbangkan hal itu agar lebih banyak lagi warga yang bisa menyaksikan event bersejarah ini sehingga mereka ikut bangga dengan daerahnya selaku tuan rumah.</p> <p>Penggalan paragraf di atas merupakan struktur teks editorial bagian?</p>	Argumentasi	50
	Total skor		100

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor}}{100} \times 100$$

c. PENILAIAN KETERAMPILAN

Jenis Proyek : Menyusun paragraf yang mencirikan 3 bagian struktur teks editorial

Kelas / smt : XII / 1

No	Nama Siswa	Struktur Seks Editorial			Jumlah skor
		Tesis	Argumentasi	Penegasan ulang	
1					
2					
dst					

Media : Teks Editorial

Memanjakan Koruptor

Hukuman yang ringan ditambah dengan fasilitas remisi semakin memanjakan koruptor di negeri ini. Dimanjakan karena Mahkamah Agung mengabulkan permohonan judicial review untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi.

MA mencabut dan membatalkan PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam PP tersebut, koruptor bisa mendapatkan remisi dengan syarat lebih ketat jika dibandingkan dengan narapidana lainnya.

Syarat yang dimaksud ialah terpidana korupsi harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator). Selain itu, remisi diberikan setelah terpidana korupsi telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pertimbangan utama pemerintah membatasi pemberian remisi untuk koruptor karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi menimbulkan kerusakan dalam skala yang sangat luas sehingga korupsi juga dianggap sebagai kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan.

Menurut MA, keberadaan PP 99/2012 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan. MA menegaskan, persyaratan memperoleh remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan. Remisi harus diberikan kepada semua napi, kecuali dicabut oleh putusan pengadilan.

Penegasan MA itu memperlihatkan adanya perubahan sikap yang sangat ekstrem di lembaga benteng terakhir pencari keadilan itu. Sebab, sebelumnya, MA menyatakan pengetatan pemberian remisi kepada terpidana dengan kategori kejahatan khusus, salah satunya korupsi, ialah konstitusional seperti tertuang dalam putusan MA Nomor 51 P/HUM/2013 dan Nomor 63 P/HUM/2015.

Dalam dua putusan itu, MA menegaskan bahwa perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan karakter jenis kejahatan, sifat berbahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan seorang terpidana.

Perubahan sikap yang sangat ekstrem dari MA itu, sepertinya, mengikuti pandangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada 30 September 2021. Meski menolak seluruh permohonan yang diajukan OC Kaligis, MK berpandangan tentang model pemberian remisi harus melalui putusan peradilan. Pandangan MK itu sejalan dengan pandangan MA bahwa remisi harus diberikan kepada semua napi, kecuali dicabut putusan pengadilan.

Harapan publik untuk tidak memberikan keistimewaan kepada koruptor kini berada di pundak hakim. Akan tetapi, sebaiknya publik tidak memberikan ekspektasi terlampau tinggi agar tidak mengalami kekecewaan amat mendalam dalam melihat realitasnya.

Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) atas putusan hakim pada semester pertama 2020 menemukan fakta bahwa rata-rata vonis yang diberikan kepada para koruptor hanya tiga tahun. Rinciannya, rata-rata vonis di Pengadilan Tipikor ialah 2 tahun 11 bulan. Di tingkat banding, yakni Pengadilan Tinggi, rata-rata vonisnya ialah 3 tahun 6 bulan, sedangkan baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di MA, rata-rata vonis 4 tahun 8 bulan.

Jangan terkecoh dengan rata-rata vonis yang diputus di MA yang terlihat tinggi sebab vonis itu sesungguhnya masih jauh lebih rendah daripada ancaman hukum maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Apalagi, muncul fenomena diskon hukuman koruptor. Berdasarkan data yang dimiliki KPK, pada 2020, tercatat ada 20 perkara korupsi yang hukumannya dikurangi MA.

Masih ada secercah harapan. Ada dua jenis pemidanaan, yaitu pidana pokok dan pidana

tambahan. Yang dimaksudkan dengan pidana tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu. Sejauh ini, dalam praktik, jaksa menuntut pencabutan hak politik koruptor dan sering pula dikabulkan hakim.

Eloknya, jaksa juga menuntut pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat koruptor sebagai hukuman tambahan. Jaksa KPK pernah menuntut Muhtar Ependy dihukum pidana tambahan, yakni pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, hakim menolak dengan alasan hak remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam UU dan menjadi kewenangan pemerintah untuk memberikan atau tidak memberikan kepada seorang terpidana.

Kini tergantung pemerintah, apakah masih berpihak kepada koruptor atau berpihak kepada rasa keadilan masyarakat. Apakah korupsi masih dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau biasa-biasa saja. Mestinya pemerintah tidak royal memberikan remisi.

Memang, penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Menghukum koruptor secara maksimal ditambah memperketat syarat remisi sesungguhnya sebuah pesan yang kuat untuk banyak orang di luar tembok penjara agar mereka mengurungkan niat merampok uang negara. Pesan itulah yang dihapus MA dan kini korupsi sebagai kejahatan yang biasa-biasa saja.

Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2473-memanjakan-koruptor (1 November 2021)

Nama :
Kelas :
No absen :

Evaluasi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

NO	Soal	Jawaban
1	<p>Perhatikan penggalan paragraf berikut!</p> <p>Lonjakan kasus positif covid-19 yang terjadi di Inggris menjadi perhatian Indonesia. Kasus covid-19 kembali meledak di Inggris. Padahal, cakupan vaksinasi di negara itu telah melebihi 70% jumlah penduduk. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya kini terus mengamati perkembangan situasi covid-19 di Inggris. "Kami sudah lihat di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2," katanya dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.</p> <p>Penggalan paragraf di atas merupakan struktur teks editorial bagian?</p>	
2	<p>Perhatikan penggalan paragraf berikut!</p> <p>Selain harus sukses dari sisi penyelenggaraan, event bertaraf internasional ini eloknya juga dapat memberi manfaat ekonomi serta hiburan bagi warga setempat. Harga tiket termurah yang dipatok sekitar Rp800 ribu hingga Rp1 juta, rasanya masih terlalu mahal bagi warga Lombok serta NTB pada umumnya. Pihak penyelenggara mungkin dapat mempertimbangkan hal itu agar lebih banyak lagi warga yang bisa menyaksikan event bersejarah ini sehingga mereka ikut bangga dengan daerahnya selaku tuan rumah.</p> <p>Penggalan paragraf di atas merupakan struktur teks editorial bagian?</p>	